



# STRATEGI DAN KEBIJAKAN AFIRMATIF PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

*Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, PhD*

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Seminar Pembangunan di Indonesia Timur:  
Pelajaran Selama Ini dan Beberapa Pemikiran Ke Depan  
SMERU Research Institute

Jakarta, 12 April 2018



## KERANGKA PAPARAN

1

GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR

2

TRANSFORMASI DAN AKSELERASI PEMBANGUNAN  
KAWASAN TIMUR

3

KEBIJAKAN AFIRMATIF PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR  
(RPJMNS 2015-2019)

4

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR  
(VISI 2045)

## GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR

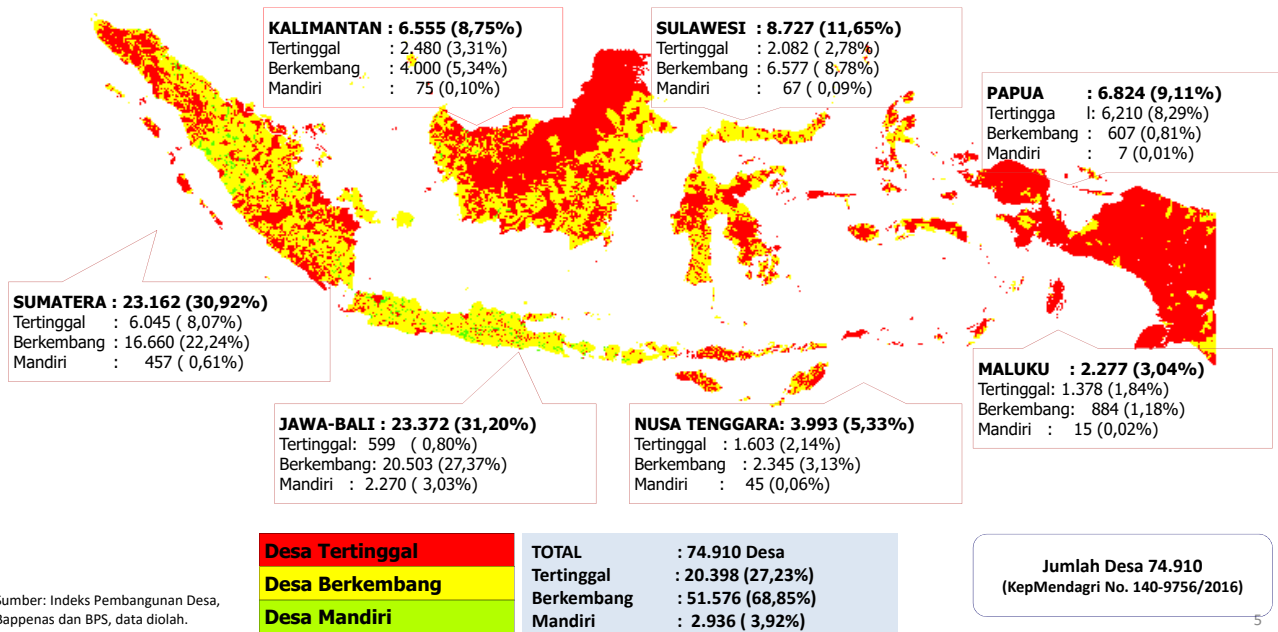
### DISTRIBUSI PDRB NASIONAL 1978-2017 (PERSEN)

PULAU	1978	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Sumatera	27,6	28,7	24,9	22,8	22,0	22,4	22,9	22,39	22,87	23,10	23,05	23,01	22,21	22,03	21,70
Jawa	50,6	53,8	57,4	58,6	58,0	60,0	57,9	57,28	56,70	56,69	57,06	57,39	58,29	58,51	58,60
Kalimantan	10,2	8,7	8,9	9,2	9,9	8,9	10,4	9,41	9,92	9,66	9,25	8,76	8,15	7,83	8,20
Sulawesi	5,5	4,2	4,1	4,1	4,6	4,0	4,3	5,19	5,24	5,41	5,50	5,65	5,92	6,04	6,10
Bali dan Nusa Tenggara	3,1	2,8	3,0	3,3	2,9	2,8	2,5	3,03	2,83	2,79	2,80	2,87	3,06	3,12	3,10
Maluku dan Papua	2,9	1,8	1,7	2,0	2,5	1,8	2,0	2,70	2,44	2,35	2,34	2,32	2,37	2,46	2,30
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

- Selama hampir **30 tahun (1978-2008) tidak terjadi perubahan** yang berarti dalam distribusi atau kontribusi pembentukan PDB Nasional. Dengan menggunakan tahun dasar terbaru 2010, kontribusi setiap wilayah terhadap pembentukan PDB nasional juga tidak mengalami perubahan.
- Pembangunan masih terpusat di KBI** → Rata-rata kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB Nasional Tahun 2010-2016 sebesar **80,54%**, sedangkan rata-rata kontribusi Sulawesi, Bali-Nusra, Maluku-Papua hanya sebesar **3,8%**
- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur di tahun 2017 mengalami penurunan, kecuali wilayah Sulawesi. **Sulawesi dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di kawasan timur.**

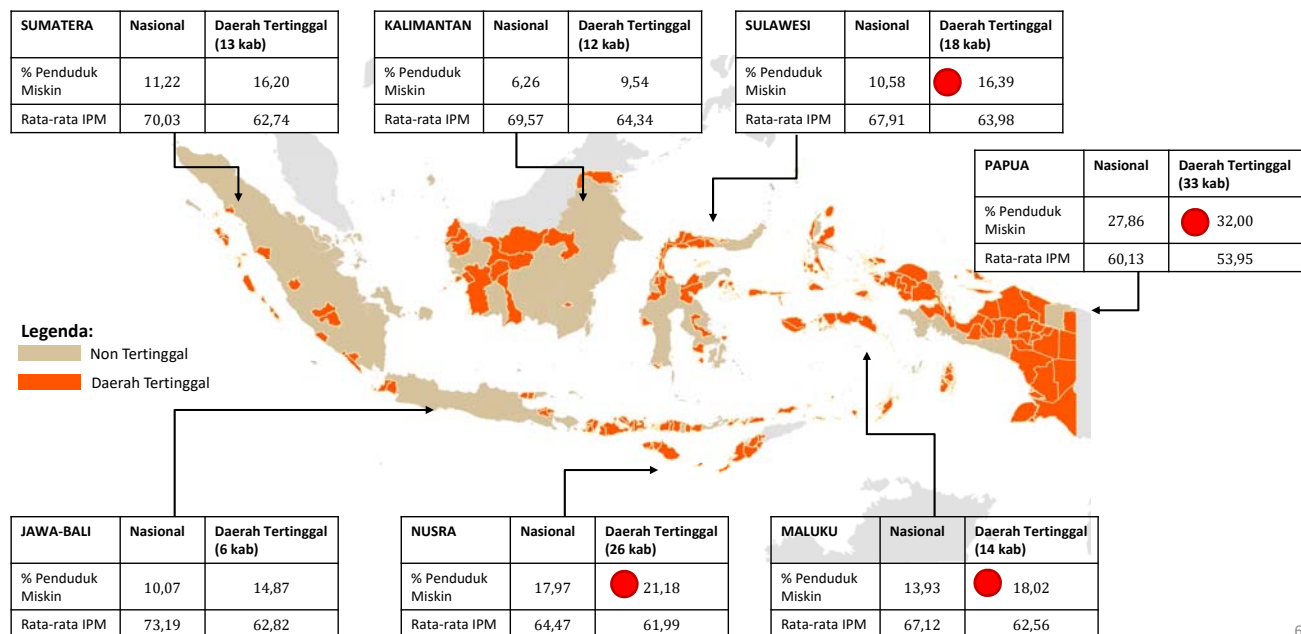
\*Q1-Q3 (Januari-September), BPS Indonesia

# STATUS DESA

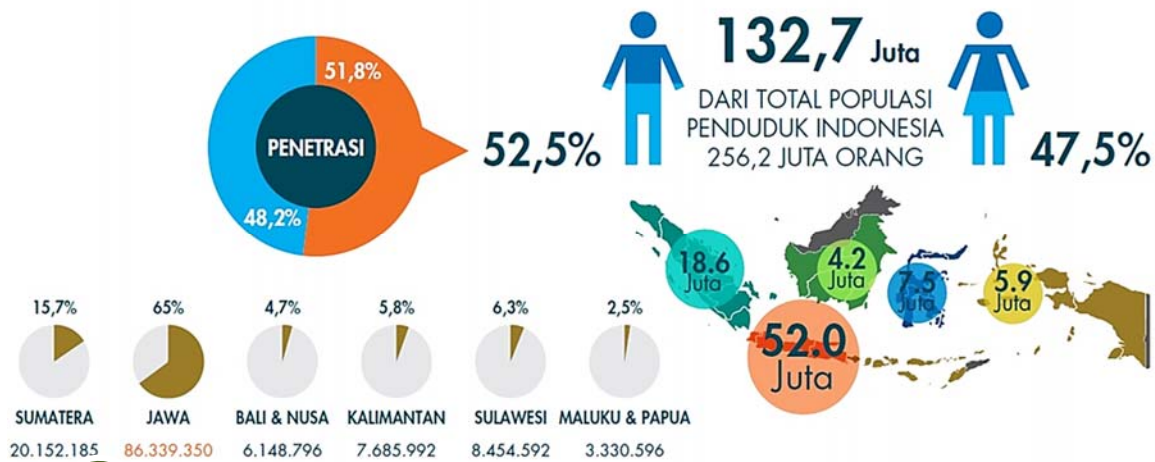


# KONDISI CAPAIAN PEMBANGUNAN 122 DAERAH TERTINGGAL

(Perpres 131/2015 tentang Penetapan 122 Daerah Tertinggal)



## PERSEBARAN PENGGUNA INTERNET



Data pengguna Internet antar wilayah masih memperlihatkan ketimpangan, terlihat di Pulau Jawa sudah mencapai lebih dari setengah penduduk telah melek internet, namun di sisi lain di kawasan timur Indonesia persentase pengguna internetnya masih sangat rendah.

7

## POLA ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH 2005-2008

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ JUTA)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>237.729</b>	<b>100,00</b>	<b>224.698</b>	<b>100,00</b>	<b>10.030</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

### Distriusi Dana Dekon+TP (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 81,69
2. Kalimantan: 4,93
3. Sulawesi: 6,71
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 4,32
5. Papua: 2,08

### Distriusi Dana Perimbangan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59
2. Kalimantan: 13,57
3. Sulawesi: 10,60
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,30
5. Papua: 6,18

### Distriusi Investasi PMDN (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78
2. Kalimantan: 7,19
3. Sulawesi: 5,26
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08
5. Papua: 0,70

### Distriusi Kredit Perbankan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22
2. Kalimantan: 5,18
3. Sulawesi: 4,50
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21
5. Papua: 0,59

WILAYAH	INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
<b>TOTAL</b>	<b>26.654</b>	<b>100</b>	<b>1.254.951</b>	<b>100</b>	<b>624.708</b>	<b>100,00</b>

8

## POLA ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH 2010-2012

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA	
	RATA-RATA 2011-2013 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2010-2012 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2010-2012 (US \$ JUTA)	SHARE (%)
SUMATERA	7.869.826	25,95	12.865.945	26,23	2.184	10,88
JAWA-BALI	10.412.086	34,33	18.044.459	36,79	12.909	64,27
KALIMANTAN	2.883.790	9,51	7.067.929	14,41	2.380	11,85
SULAWESI	4.878.335	16,08	4.646.829	9,47	1.027	5,11
NUSA TENGGARA	1.040.742	3,43	1.548.557	3,16	163	0,81
MALUKU	1.946.975	6,42	1.810.549	3,69	446	2,22
PAPUA	1.297.238	4,28	3.061.988	6,24	975	4,86
TOTAL	30.328.990	100,00	49.046.255	100,00	20.085	100,00

### Distriusi Dana Dekon+TP (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 60,29
2. Kalimantan: 9,51
3. Sulawesi: 15,08
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,85
5. Papua: 4,28

### Distriusi Dana Perimbangan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 63,02
2. Kalimantan: 14,41
3. Sulawesi: 9,47
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 6,85
5. Papua: 6,24

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

### Distriusi Investasi PMDN (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 71,48
2. Kalimantan: 19,57
3. Sulawesi: 7,20
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,98
5. Papua: 0,77

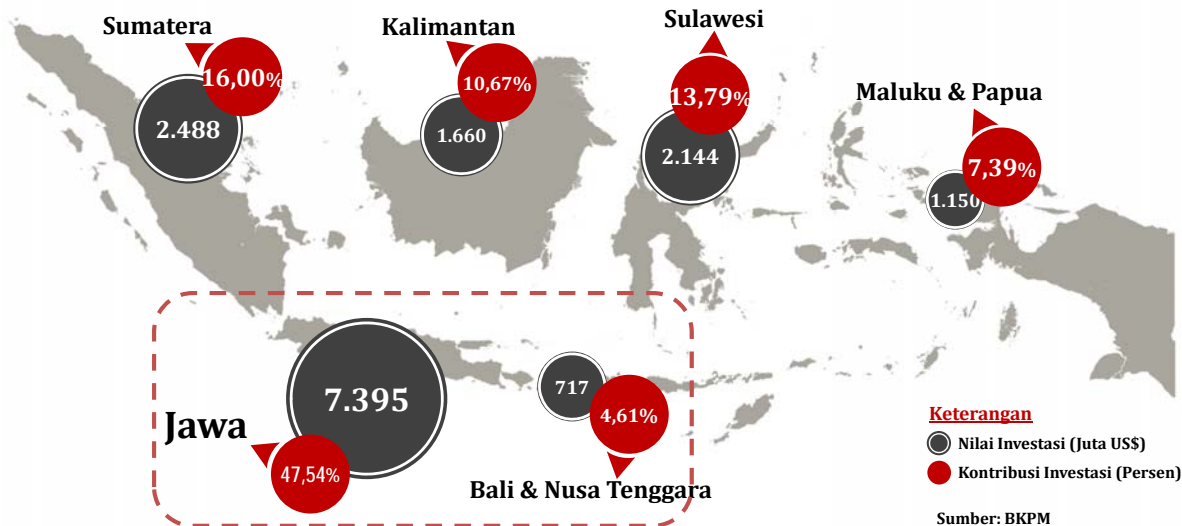
### Distribusi Kredit Perbankan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,75
2. Kalimantan: 6,32
3. Sulawesi: 4,74
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,48
5. Papua: 0,71

WILAYAH	INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN BANK UMUM DAN BPR		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2010-2012 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2010-2012 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	11.604,93	15,22	349.642	15,55	117.393	18,79
JAWA-BALI	42.914,74	56,27	1.600.950	71,20	408.768	65,43
KALIMANTAN	14.927,60	19,57	142.033	6,32	33.704	5,40
SULAWESI	5.488,70	7,20	106.620	4,74	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	112,49	0,15	8.983	0,40	11.971	1,92
MALUKU	636,34	0,83	24.280	1,08	3.523	0,56
PAPUA	584,94	0,77	15.940	0,71	6.068	0,97
TOTAL	76.269,74	100,00	2.248.447	100,00	624.708	100,00

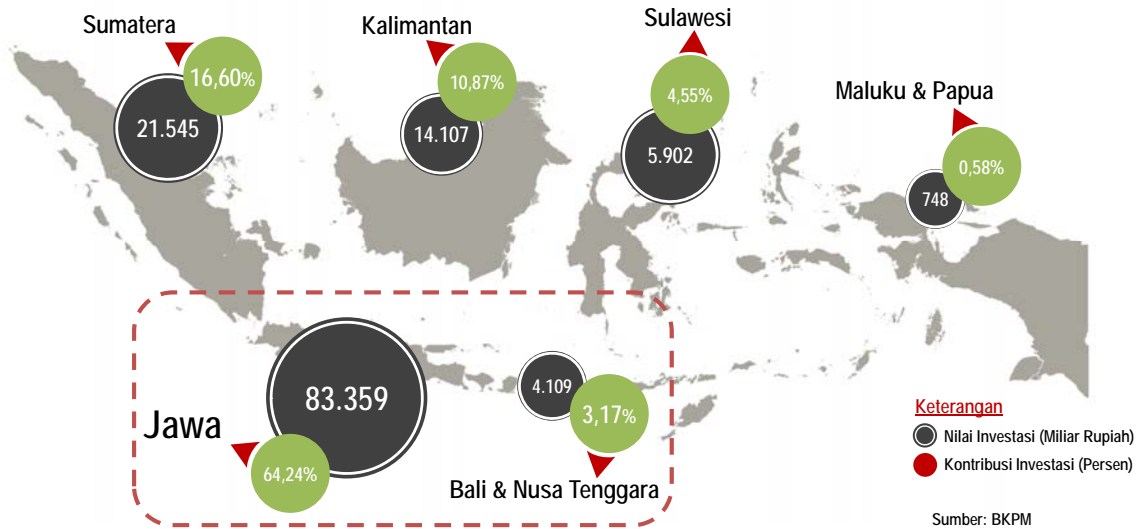
## PERSEBARAN INVESTASI PMA

Persebaran investasi PMA di Indonesia secara spasial pada Semester I - 2017 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa dan Bali dengan kontribusi sebesar 52,15 persen.



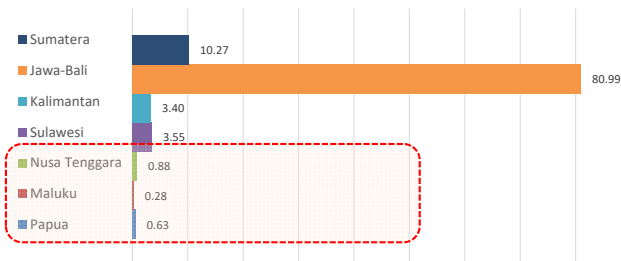
## PERSEBARAN INVESTASI PMDN

Persebaran investasi PMDN di Indonesia secara spasial pada Semester I – 2017 masih didominasi oleh kelompok provinsi di **Jawa dan Bali** dengan kontribusi sebesar **67,41 persen**

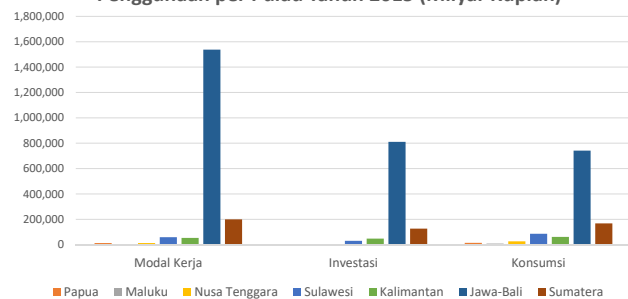


## PERSEBARAN KREDIT PERBANKAN

Distribusi Kredit Perbankan berdasarkan Lokasi Bank Penyalur per Pulau Tahun 2015 (%)

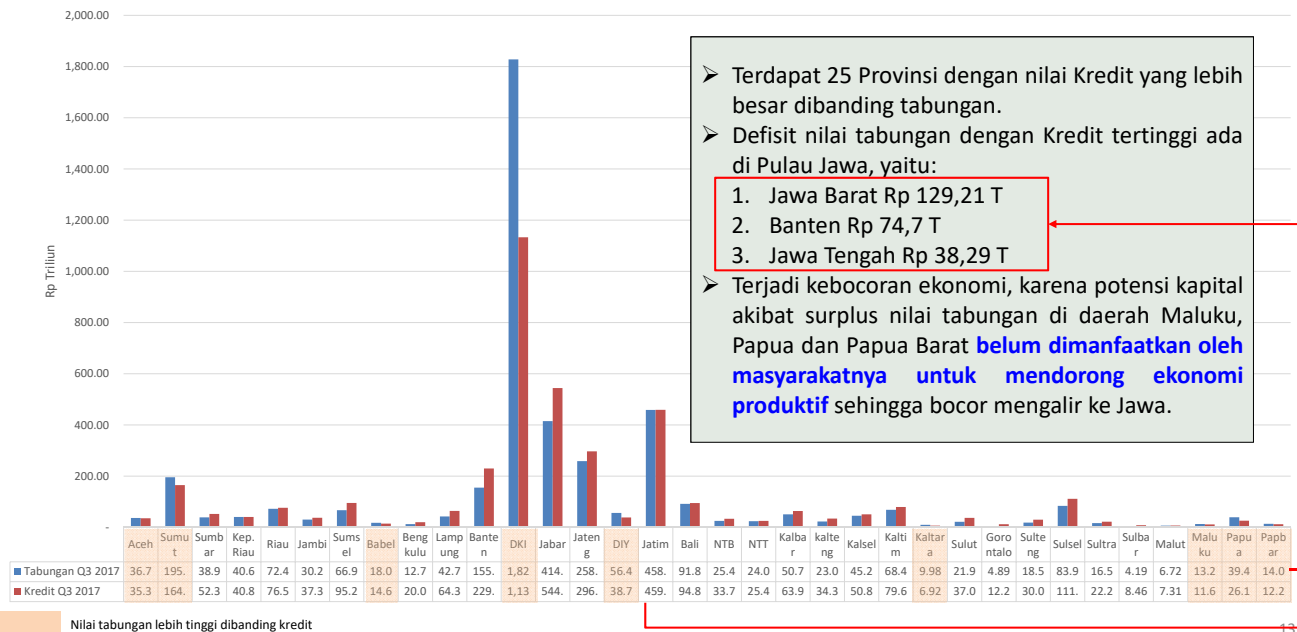


Distribusi Kredit Perbankan berdasarkan Jenis Penggunaan per Pulau Tahun 2015 (Milyar Rupiah)



- Distribusi kredit perbankan dan investasi sebagian besar masih terdapat di **wilayah Jawa-Bali** (80,99%)
- Jenis penggunaan kredit perbankan dan investasi sebagian besar **untuk modal kerja** (46,89%)
- Di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku, jenis penggunaan **kredit perbankan untuk konsumsi**.

## SANDINGAN TABUNGAN DENGAN KREDIT PER PROVINSI



- Terdapat 25 Provinsi dengan nilai Kredit yang lebih besar dibanding tabungan.
- Defisit nilai tabungan dengan Kredit tertinggi ada di Pulau Jawa, yaitu:
  1. Jawa Barat Rp 129,21 T
  2. Banten Rp 74,7 T
  3. Jawa Tengah Rp 38,29 T
- Terjadi kebocoran ekonomi, karena potensi kapital akibat surplus nilai tabungan di daerah Maluku, Papua dan Papua Barat **belum dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk mendorong ekonomi produktif** sehingga bocor mengalir ke Jawa.

**TRANSFORMASI DAN AKSELERASI  
PEMBANGUNAN DI KAWASAN TIMUR**

# PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH

Faktor Produksi	PAPUA	MALUKU	NUSA TENGGARA	SULAWESI	KALIMANTAN	JAWA	SUMATERA
Lahan	●	●	●	●	●	●	●
Benih/Bibit	●	●	●	●	●	●	●
Bahan Baku	●	●	●	●	●	●	●
Peralatan	●	●	●	●	●	●	●
Modal	●	●	●	●	●	●	●
Pengetahuan/ Teknologi	●	●	●	●	●	●	●
Informasi	●	●	●	●	●	●	●
Manajemen Usaha	●	●	●	●	●	●	●
Pendamping	●	●	●	●	●	●	●
Prasarana dan Sarana (listrik, air bersih, transportasi)	●	●	●	●	●	●	●

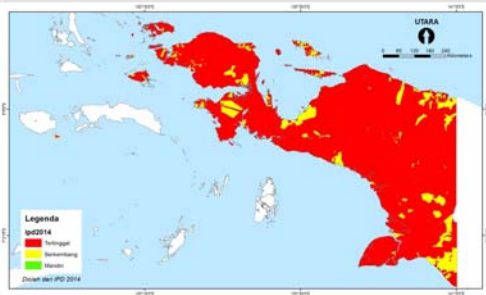
● Sangat kurang

● Cukup

● Baik

## POTRET KETERTINGGALAN WILAYAH PAPUA

PETA SEBARAN KONDISI DESA PULAU PAPUA TAHUN 2014



Penyebab ketertinggalan di Papua:

- SDM
- Prasarana dan Sarana Dasar
- Aksesibilitas
- Ekonomi



- o Masih adanya kampung dan distrik yang terisolasi khususnya di **PEGUNUNGAN TENGAH** disebabkan oleh terbatasnya akses transportasi darat dan tingginya biaya transportasi udara sehingga menyebabkan **DISPARITAS HARGA** sangat tinggi.
- o Terbatasnya akses **AIR BERSIH**, **LISTRIK** dan **TELEKOMUNIKASI**.



- o Terbatasnya pola budidaya masyarakat yang masih bersifat **SUBSISTEN**
- o Rendahnya **PRODUKTIVITAS**, **NILAI TAMBAH** dan **PENDAPATAN** karena terbatasnya **BENIH/BIBIT**, terbatasnya **PENGETAHUAN** dan **KETERAMPILAN TEKNOLOGI** produksi, kurangnya **TENAGA PENYULUH** dan **PENDAMPING**, rendahnya hilirisasi **PENGOLAHAN** produk unggulan, terbatasnya akses **PASAR**
- o Konflik **LAHAN** dan **TANAH ULAYAT**



- o Rendahnya angka **MELEK HURUF** dan **PARTISIPASI** pendidikan, terutama di wilayah pegunungan tengah
- o tingginya angka **KEMATIAN IBU** melahirkan dan **ANAK**; angka **PENYAKIT MENULAR** (malaria, HIV/AIDS, kolera); dan **GIZI BURUK**, dan lainnya
- o Terbatasnya dan tidak meratanya **DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN** dan **KESEHATAN** (terkonsentrasi di pesisir)
- o Terbatasnya **AKSES** menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Indikator	Baseline	Target 2019
Jumlah daerah tertinggal	33 kab	24 kab (9 kab terentaskan)
Jumlah kawasan perbatasan	31 kec lokpri, 1 PLBN	
Jumlah kawasan transmigrasi	3 kab	
jumlah desa tertinggal ke berkembang	6.139	280
jumlah desa berkembang ke mandiri	601	33



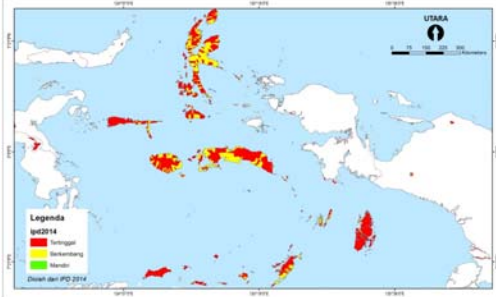
- o **Anggaran**: Alokasi cukup banyak namun kualitas penggunaan belum memadai.
- o **Pendampingan**: perlu memperhatikan budaya masyarakat dan heterogenitas kampung.
- o **BUM Desa**: Pembentukan Bumdes masih sangat sedikit.

- o Perlunya perapatan pilar batas dan Pos Pamtas serta sarpras penunjang untuk mendukung kegiatan pengawasan batas negara **RI - PNG**.
- o Jalan Perbatasan Trans Papua yang belum terbuka adalah sepanjang 301,74 Km
- o Terdapat wilayah Indonesia yang memiliki fungsi pemerintahan Negara PNG (Warasmoll dan Marantikin).



# POTRET KETERTINGGALAN WILAYAH MALUKU

PETA SEBARAN KONDISI DESA PULAU MALUKU TAHUN 2014



Indikator	Baseline	Target 2019
Jumlah daerah tertinggal	14 Kab	3 kab (11 kab terentaskan)
Jumlah kawasan perbatasan	24 kec lokpri	
Jumlah kawasan transmigrasi	1 kab	
jumlah desa tertinggal ke berkembang	1.358	351
jumlah desa berkembang ke mandiri	878	43

Penyebab ketertinggalan di Maluku:

- SDM
- Prasarana dan Sarana Dasar
- Aksesibilitas
- Ekonomi



- o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di **PULAU-PULAU KECIL TERLUAR** di **MTB, MBD & Kep Aru** yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya **HARGA PANGAN** dan **BEBAN BIAYA HIDUP**

- o Terbatasnya akses **AIR BERSIH, LISTRIK** dan **TELEKOMUNIKASI**



- o Rendahnya **PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH** dan **PENDAPATAN** karena terbatasnya **BENIH/BIBIT**, terbatasnya **PENGETAHUAN** dan **KETERAMPILAN TEKNOLOGI** produksi, kurangnya **TENAGA PENYULUH** dan **PENDAMPING**, rendahnya hilirisasi **PENGOLAHAN** produk unggulan, terbatasnya akses **PASAR**

- o Rentan terhadap **KONFLIK** sosial



- o Rendahnya angka **MELEK HURUF** dan **PARTISIPASI** pendidikan, terutama di **PULAU-PULAU KECIL**
- o tingginya angka **KEMATIAN IBU** melahirkan dan **ANAK**; dan **GIZI BURUK**, dan lainnya
- o Terbatasnya dan tidak meratanya **DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN** dan **KESEHATAN**
- o Terbatasnya **AKSES** menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan

Dana Desa

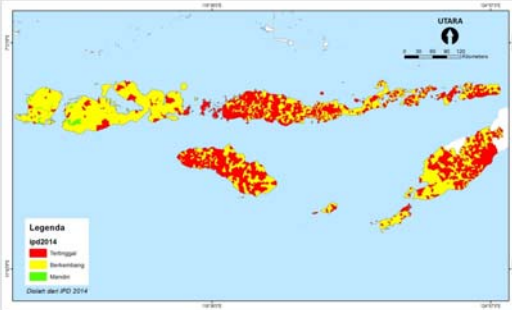
- o **Anggaran**: upaya peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran terkendala geografis yang bersifat kepulauan.
- o **Pendampingan**: perlu memperhatikan masyarakat pesisir termasuk masyarakat adat/hukum adat agar berpartisipasi dalam pembangunan.
- o **BUM Desa**: keterbatasan anggaran pembinaan Bumdes dan regulasi pendukung belum siap.



- o Peningkatan komoditas lokal untuk mendorong muatan balik tol laut khusus kawasan perbatasan.
- o Penguatan Kelembagaan pengelola pelabuhan simpul tol laut.
- o **Potensi pengembangan Blok Masela** terhadap kawasan perbatasan di sekitar Pulau Masela.

# POTRET KETERTINGGALAN WILAYAH MALUKU

PETA SEBARAN KONDISI DESA PULAU NUSA TENGGARA TAHUN 2014



Indikator	Baseline	Target 2019
Jumlah daerah tertinggal	26 Kab	6 Kab (20 Terentaskan)
Jumlah kawasan perbatasan	31 kec lokpri & 3 PLBN	
Jumlah kawasan transmigrasi	3 kab	
jumlah desa tertinggal ke berkembang	1.582	460
jumlah desa berkembang ke mandiri	2.319	74

Ketertinggalan Utama di Nusra:

- Ekonomi
- SDM



- o Kurangnya kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi
- o Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar



- o Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kesejahteraan dan daya saing masyarakat



- o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di **PULAU-PULAU KECIL TERLUAR** di **TTU, Belu, Alor, Rote Ndao & Malaka** yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya **HARGA PANGAN** dan **BEBAN BIAYA HIDUP**
- o Terbatasnya akses **AIR BERSIH, LISTRIK** dan **TELEKOMUNIKASI**

Dana Desa

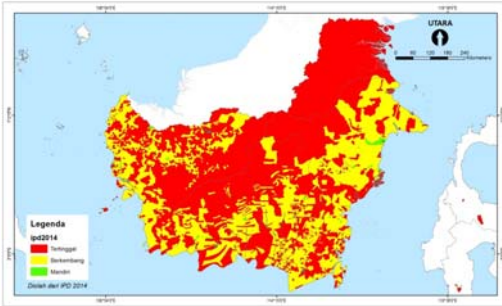
- o **Anggaran**: Alokasi belum optimal dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan.
- o **Pendampingan**: perlu memperhatikan kelompok marjinal dan hukum adat yang berlaku.
- o **BUM Desa**: pengelolaan Bumdes belum memadai.



- o Adanya **unresolved dan unsurveyed segmen batas** terutama di **Enclave Oekusi**.
- o Kebutuhan pembangunan jalan antar desa dan penghubung jalan paralel perbatasan.
- o Potensi ternak sapi di dan komoditas pertanian yang dapat dikembangkan.
- o Batas negara berupa sungai yang rentan akan kekeringan saat musim panas berpotensi digunakan sebagai jalur ilegal pelintas batas.

# FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KALIMANTAN

PETA SEBARAN KONDISI DESA PULAU KALIMANTAN TAHUN 2014



Penyebab ketertinggalan di Kalimantan:

- SDM
- Prasarana dan Sarana Dasar
- Aksesibilitas
- Ekonomi

- Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di **KAWASAN PERBATASAN** yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi darat dan udara, dan tingginya biaya transportasi udara sehingga mengakibatkan tingginya **HARGA PANGAN** dan **BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA)**
- Terbatasnya akses **AIR BERSIH, LISTRIK** dan **TELEKOMUNIKASI**



- Rendahnya **PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH** dan **PENDAPATAN** karena terbatasnya **BENIH/BIBIT**, terbatasnya **PENGETAHUAN** dan **KETERAMPILAN TEKNOLOGI** produksi, kurangnya **TENAGA PENYULUH** dan **PENDAMPING**, rendahnya hilirisasi **PENGOLAHAN** produk unggulan, dan terbatasnya akses **PASAR**
- Rentan terhadap **KONFLIK** sosial



- Rendahnya angka **MELEK HURUF** dan **PARTISIPASI** pendidikan, terutama di **KAWASAN PERBATASAN**
- Terbatasnya dan kurang meratanya **DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN** dan **KESEHATAN**
- Terbatasnya **AKSES** menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan



- Sering terjadinya **BENCANA ALAM** kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat



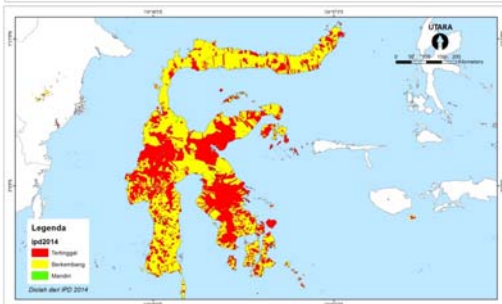
Indikator	Baseline	Target 2019
jumlah desa tertinggal ke berkembang	2.452	707
jumlah desa berkembang ke mandiri	3.960	146

## Isu Strategis

1. **Dana Desa:** Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja.
2. **Pendampingan:** Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat desa perbatasan.
3. **Prasarana:** Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi.
4. **Ekonomi:** Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.

# POTRET KETERTINGGALAN WILAYAH MALUKU

PETA SEBARAN KONDISI DESA PULAU SULAWESI TAHUN 2014



Ketertinggalan Utama di Sulawesi:

- SDM
- Ekonomi
- Karakteristik Daerah



- Rendahnya angka melek huruf, partisipasi pendidikan, di terutama di wilayah kepulauan
- Tidak meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan
- Terbatasnya akses menuju pusat pelayanan kesehatan & pendidikan



- Masyarakat masih bercocok tanam secara subsisten & ladang berpindah
- Kurangnya kemampuan untuk mengelola sumber daya lokal yang berhubungan dengan penyerapan potensi ekonomi
- Rendahnya produktivitas komoditas karena terbatasnya teknologi produksi, rendahnya hilirisasi pengolahan produk unggulan, terbatasnya akses produksi lokal terhadap pasar



- Tingginya angka kejadian konflik di wilayah Sulawesi menjadi penyebab kurang optimalnya pembangunan di wilayah tersebut;
- Sering terjadinya **bencana alam seperti Longsor dan Banjir** menjadi penyebab terhambatnya aksesibilitas masyarakat lokal

Indikator	Baseline	Target 2019
Jumlah daerah tertinggal	18	4 Kab (14 Kab terentaskan)
Jumlah kawasan perbatasan	7 kec lokpri	
Jumlah kawasan transmigrasi	12 kab	
jumlah desa tertinggal ke berkembang	2.063	723
jumlah desa berkembang ke mandiri	6.506	173

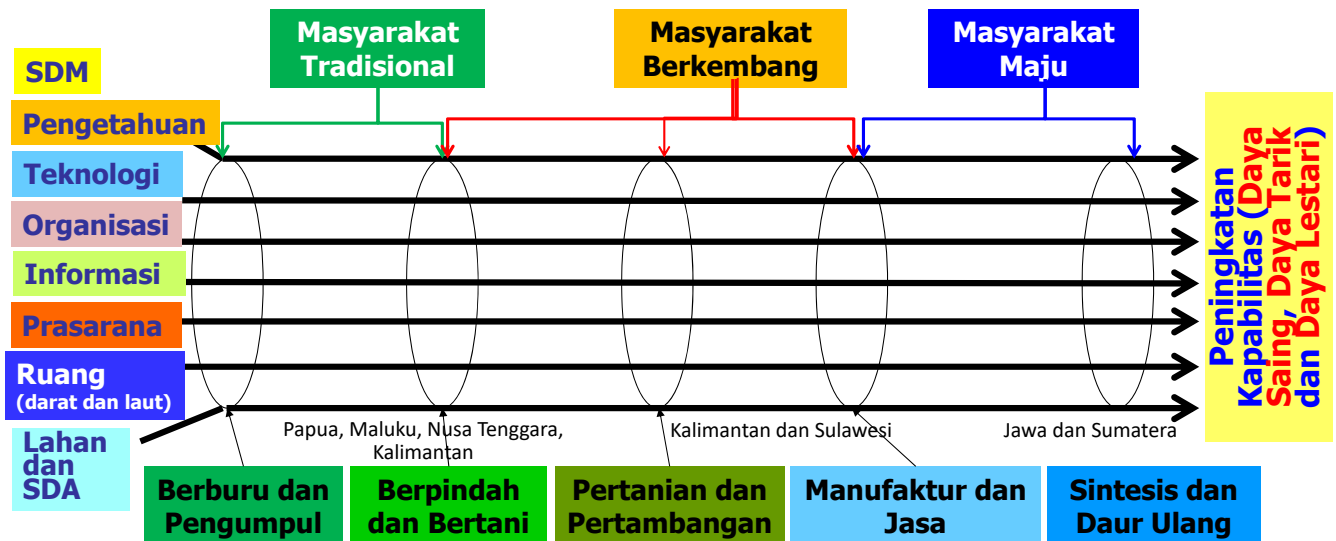


- **Anggaran:** kualitas penyerapan keuangan desa termasuk dana desa belum optimal.
- **Pendampingan:** perlu bermitra dengan tokoh adat dan berupaya meminimalisasi konflik yang kerap terjadi.
- **BUM Desa:** Pengembangan Bumdes belum sebanding dengan nilai ekonomi yang ingin dicapai karena masih dalam tahapan rintisan.

- Keterbatasan PLB mengakibatkan adanya **perlintasan batas secara ilegal antara Filipina dengan Indonesia**.

- Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap barang pokok dari Filipina.
- Hasil **perikanan tangkap di sekitar Sangehe** banyak **didistribusikan ke General Santos** dengan keuntungan harga jual yang tinggi.
- Belum **meratanya distribusi energy di Sangehe dan Talaud** (Listrik dan BBM)

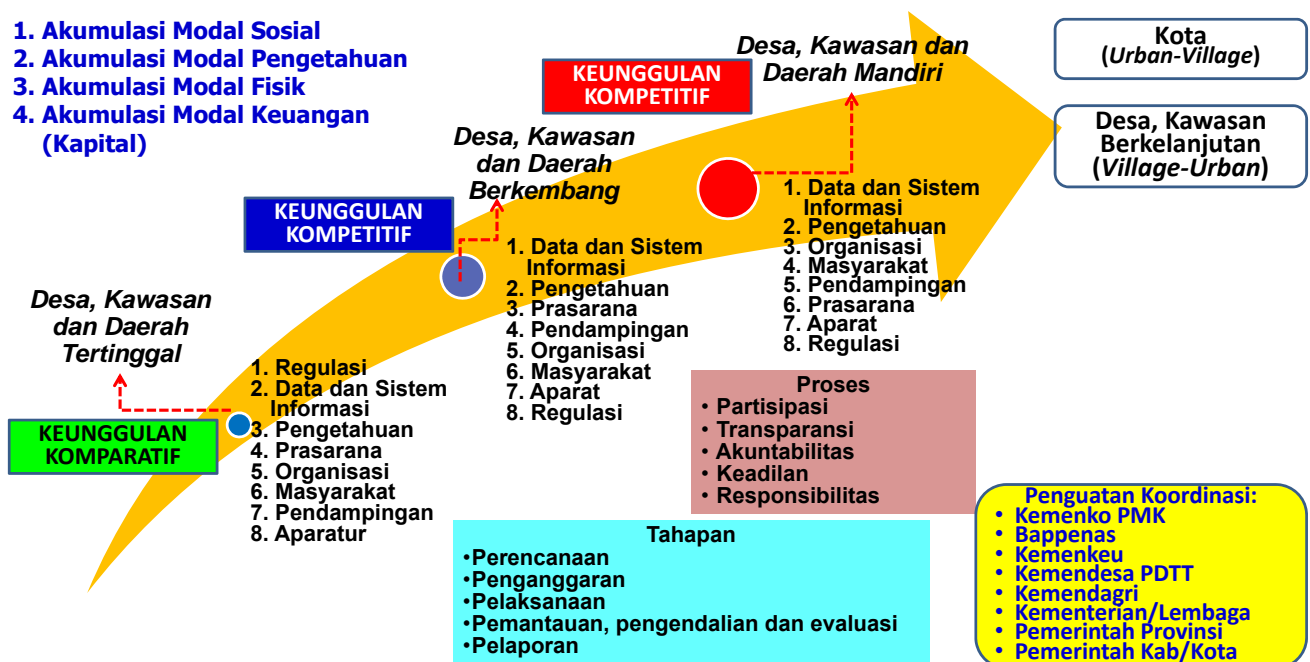
# TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA



Kebijakan pembangunan harus mendorong transformasi dan akselerasi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat menjadi produktif, maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat

# TRANSFORMASI DESA, KAWASAN DAN DAERAH

1. Akumulasi Modal Sosial
2. Akumulasi Modal Pengetahuan
3. Akumulasi Modal Fisik
4. Akumulasi Modal Keuangan (Kapital)



## **KEBIJAKAN AFIRMATIF PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR (RPJMN 2015-2019)**

### **AGENDA PEMBANGUNAN NAWACITA**

- ❑ Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah:
  - ❑ Nawa Cita 3: Membangun Indonesia DARI PINGGIRAN dengan **MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA** dalam kerangka Negara Kesatuan
  - ❑ Nawa Cita 6: Meningkatkan **PRODUKTIVITAS RAKYAT** dan **DAYA SAING** di pasar internasional;
  - ❑ Nawa Cita 7: Mewujudkan **KEMANDIRIAN EKONOMI** dengan menggerakkan **SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK**
- ❑ Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah → Daya saing daerah ditentukan oleh **DESA dan KAWASAN PERDESAAN** yang **MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH** dan **BERDAYA SAING TINGGI**;
- ❑ Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan khususnya di Kawasan Timur hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama, kemitraan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pelaku usaha yang solid dan berkelanjutan.

# RKP 2019 SEBAGAI PENUTUP KABINET KERJA



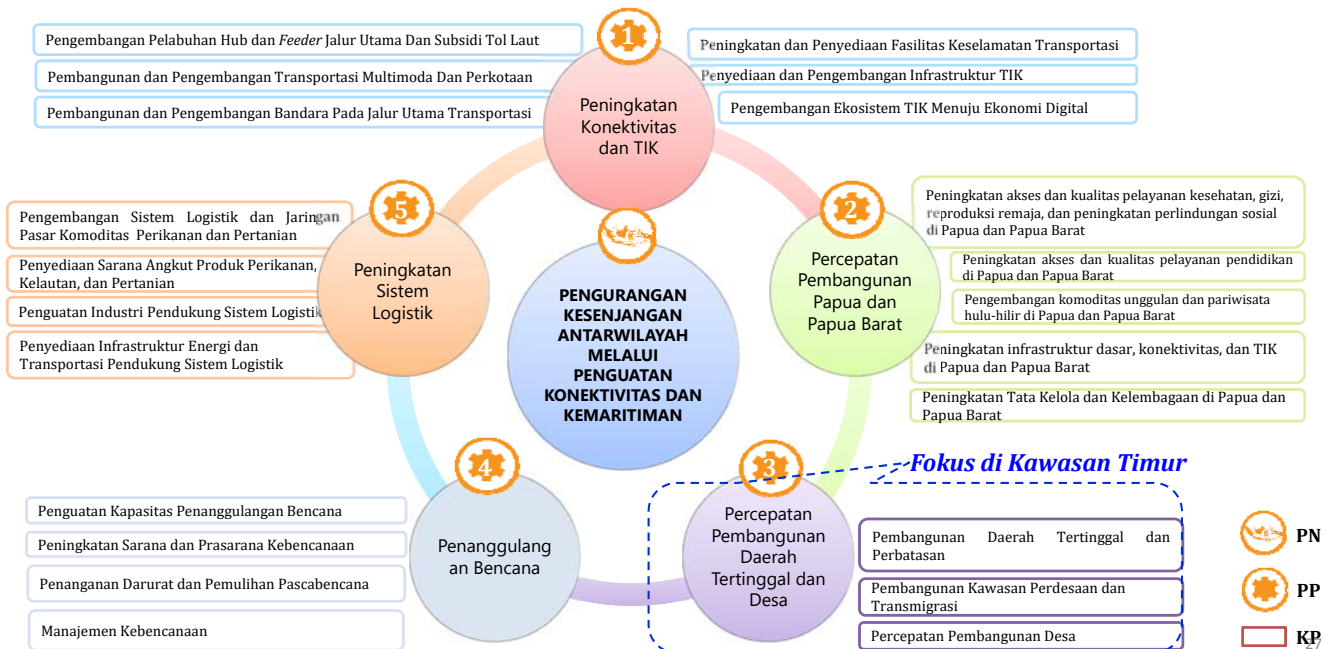
## TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL

### Prioritas Nasional



*Mainstreaming: Revolusi Mental, kesetaraan gender, lingkungan, governance.*

## PRIORITAS NASIONAL 2: PENGURANGAN KESEJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

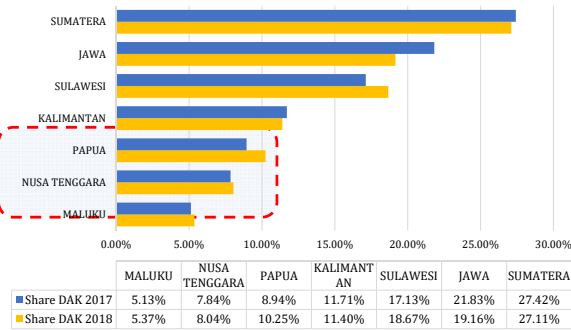


## ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2019

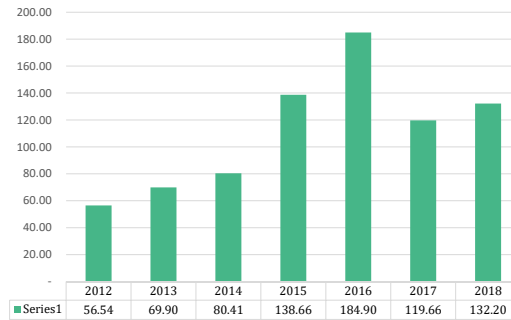


# PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK

Share Total Alokasi DAK Fisik Seluruh Kab/Kota Berdasarkan Wilayah Pulau 2017-2018



Rata-Rata Total Alokasi DAK Fisik di Daerah Tertinggal dan Perbatasan 2012-2018 (Rp Miliar)

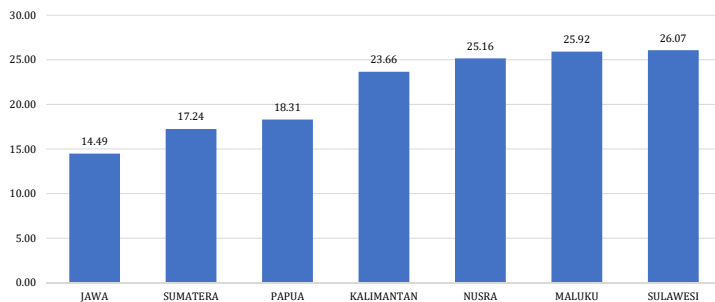


- Distribusi (*share*) total alokasi DAK fisik tahun 2017-2018 mengalami **pergerakan** yaitu penurunan di Wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dan peningkatan di Wilayah Sulawesi, Papua, Nusra, dan Maluku. Hal ini menunjukkan **perubahan keberpihakan ke wilayah timur**;
- Rata-rata alokasi seluruh bidang DAK di daerah tertinggal dan perbatasan telah menunjukkan keberpihakan karena terus mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan signifikan dari Rp 184,9 M per kab/kota tahun 2016 menjadi Rp 119,66 per kab/kota tahun 2017, dan kembali **mengalami peningkatan pada tahun 2018**.

29

# DUKUNGAN DAK DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN

RATA-RATA KONTRIBUSI DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017 (%)



5 Kabupaten dengan Kontribusi DAK Terendah terhadap Belanja Langsung Tahun 2017

Kabupaten	Kontribusi DAK Terhadap Belanja Langsung (%)
Bengkalis	3,28
Kota Batam	5,19
Teluk Bintuni	7,61
Karimun	8,63
Rokan Hilir	8,94

5 Kabupaten dengan Kontribusi DAK Tertinggi terhadap Belanja langsung Tahun 2017

Kabupaten	Kontribusi DAK Terhadap Belanja Langsung (%)
Paniai	38,24
Belu	38,88
Toli-toli	38,99
Bengkayang	44,99
Kepulauan Sangihe	45,95

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap pembangunan infrastruktur daerah dilihat dari sisi **kontribusi (%) DAK Fisik terhadap alokasi belanja langsung**.
2. Daerah Tertinggal di **Wilayah Sulawesi memiliki ketergantungan yang paling tinggi** terhadap DAK dengan nilai rata-rata persentase kontribusi DAK terhadap belanja modal **sebesar 26,07%** (lebih besar DAK dibanding realisasi belanja langsung)
3. Kab yang memiliki tingkat ketergantungan paling tinggi adalah **Kep. Sangihe** dengan nilai persentase kontribusi DAK terhadap belanja langsung **sebesar 45,95%**
4. Dalam rangka meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal diperlukan keberpihakan pengalokasian DAK yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ketertinggalannya.

• *Komponen Belanja Langsung: belanja pegawai langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal*

30

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR (VISI 2045)

## SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2016 -2045

32

5,1% per tahun

### • DASAR (BASELINE)

- BAU, gejala global berpengaruh besar namun harga komoditi tinggi sebagian periode atau pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditi rendah tanpa gejala global besar

5,7% per tahun

### • SEDANG

- Business as usual (BAU), reformasi kurang berjalan sesuai harapan, harga komoditi tinggi pada sebagian periode, pencapaian target pokok seperti 30 tahun lalu

6,4% per tahun

### • TINGGI

- Reformasi struktural berjalan sesuai diharapkan serta pertumbuhan ekonomi dunia relatif tinggi
- Target-target pokok tercapai dengan baik

Terdapat skenario pertumbuhan ekonomi rendah 4,5%/tahun apabila terdapat gejala global yang berpengaruh besar pada ekonomi Indonesia dan harga komoditi rendah pada seluruh periode. Ke luar dari MIT tahun 2041, PDB per kapita tahun 2045 USD 16.149, dan urutan PDB ke-10 pada tahun 2045

INDIKATOR	1986-2015	SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2016-2045		
		DASAR	SEDANG	TINGGI
Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata (%/tahun)	5,1	5,1	5,7	6,4
Pertumbuhan Penduduk (%/tahun)	1,50	0,71	0,71	0,71
Ranking PDB Dunia *)	16	8	7	4
PDB per Kapita (USD *)	3374	19794	23201	28934
Tahun ke luar dari Middle Income Trap (MIT)		2038	2037	2034
<b>INVESTASI</b>				
▪ Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	6,4	5,4	6,2	7,3
▪ Peranan terhadap PDB (% *)	32,8	33,1	37,6	39,0
<b>EKSPOR DAN KETERBUKAAN EKONOMI</b>				
▪ Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	7,0	5,6	6,5	7,9
▪ Keterbukaan [(Ekspor+Impor)/PDB](% *)	34,0	49,2	51,5	54,0
<b>INDUSTRI</b>				
▪ Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	6,3	5,2	6,4	7,8
▪ Peranan terhadap PDB (% *)	21,0	23,4	26,9	32,0
<b>PERTANIAN</b>				
▪ Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)	3,1	3,0	3,0	3,0
▪ Peranan terhadap PDB (% *)	13,5	7,8	7,0	6,5

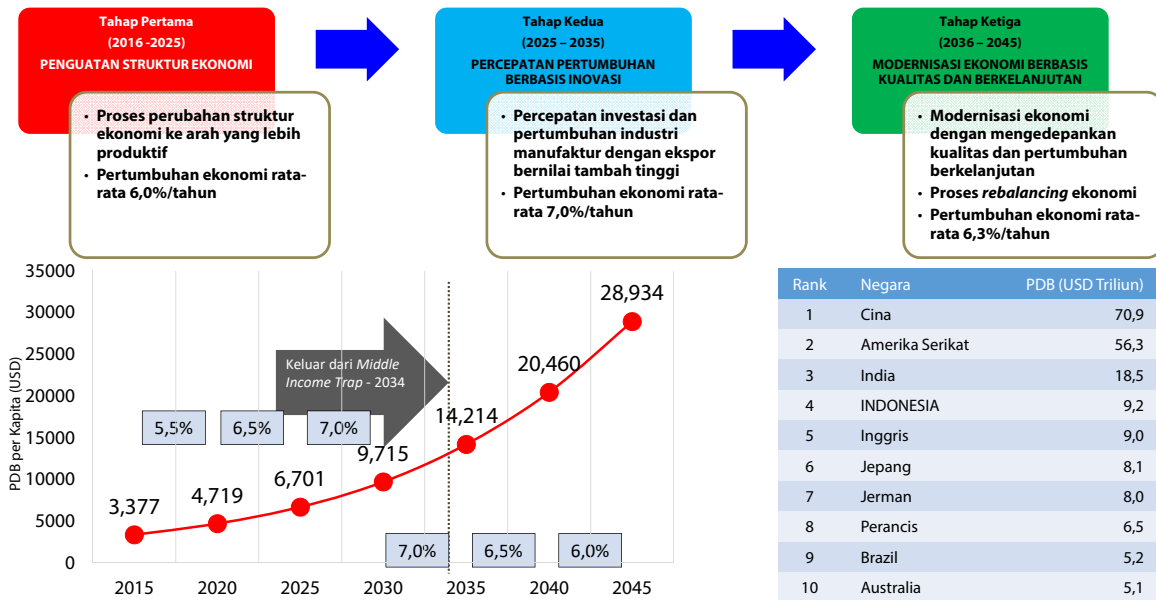
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas \*) Akhir Periode



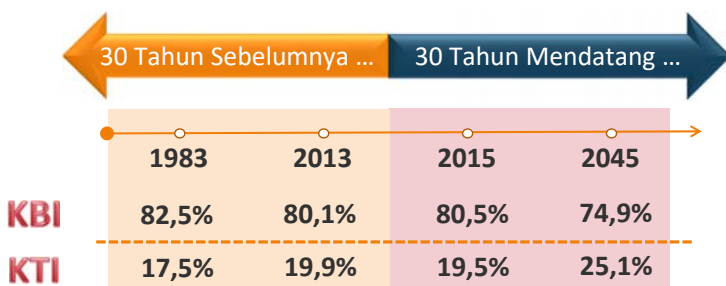
# SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI

33

- Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh rata-rata 6,4%/tahun.
- Indonesia akan menjadi negara pendapatan tinggi (ke luar dari *middle income trap*) tahun 2034
  - Indoneai akan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-4 tahun 2045



# TANTANGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**"AFIRMATIF"**  
dalam melakukan alokasi dan distribusi sumberdaya pada daerah yang tertinggal

↓

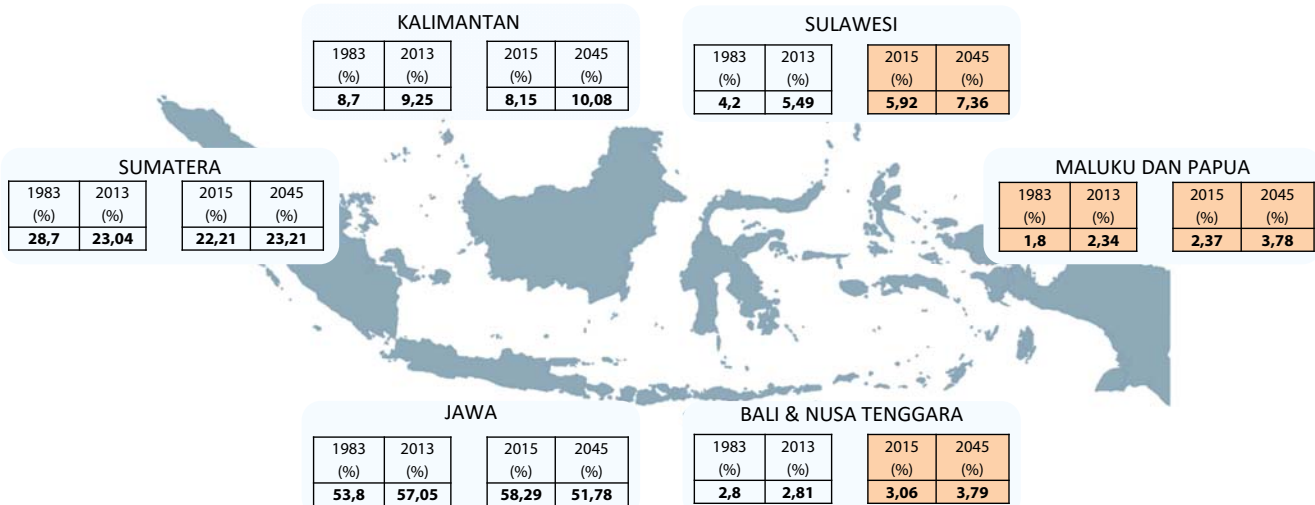
**PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

- Memperkuat dan memperluas basis-basis perekonomian wilayah timur Indonesia dengan melakukan revitalisasi desa/kampung,
- Mengembangkan kota-kota baru dan pusat-pusat produksi dan perdagangan,
- Memperkuat keterkaitan antarwilayah,
- Membangun dan memperkuat rantai industri hulu hilir produk unggulan berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan
  - peningkatan kualitas sumber daya manusia,
  - pengembangan pusat-pusat penelitian dan inovasi,
  - penyediaan prasarana dan sarana transportasi, informasi dan komunikasi,
  - pembangunan pembangkit dan jaringan listrik, pengelolaan sumber air baku dan jaringan air bersih.

34

# TRANSFORMASI STRUKTUR SPASIAL EKONOMI 2045

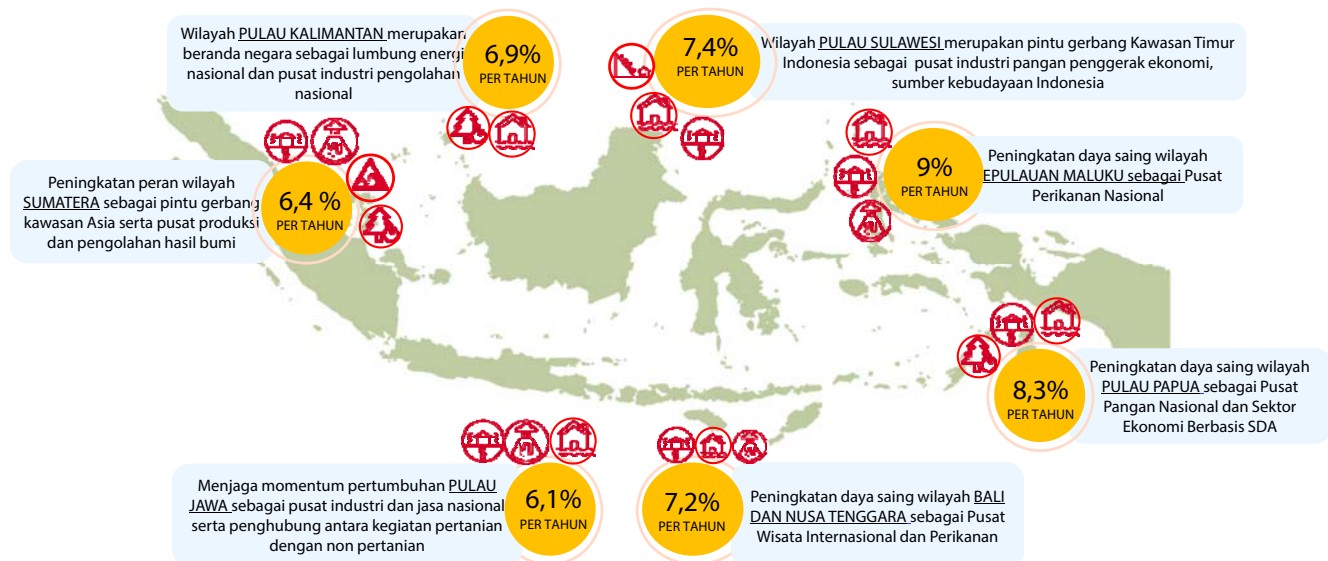
“Distribusi ekonomi wilayah Jawa yang dominan akan bergeser ke wilayah luar Jawa dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah Jawa”



35

## TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH 2016 - 2045

Pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan risiko bencana tinggi sesuai dengan karakteristik di setiap wilayah



36

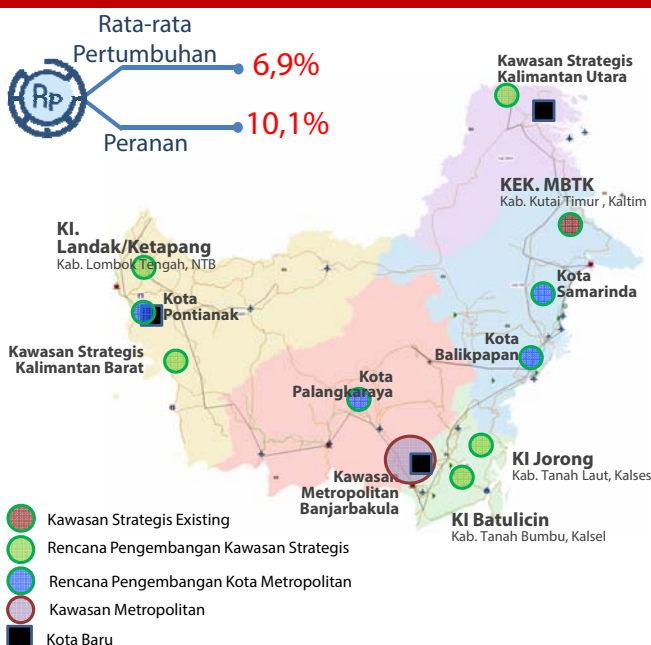
# RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA 2045

37



- Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan
- Lumbung ternak nasional
- Peningkatan sektor industri pengolahan → industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolah mutiara, industri kerajinan tenun
- Kawasan metropolitan Sarbagita, rencana pengembangan kawasan metropolitan Mataram Raya
- Kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika
- Pengembangan Kota Pelabuhan di Mataram dan Kupang

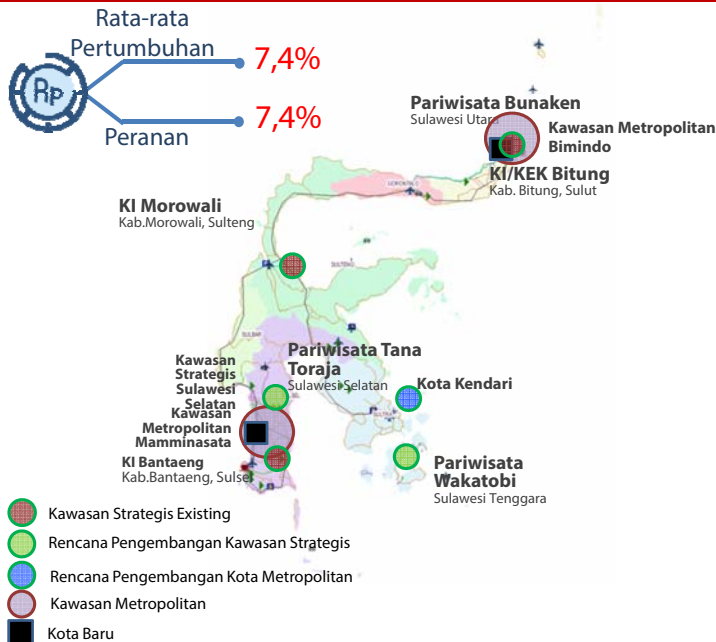
# RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN 2045



- Pengembangan *Agroforestry* untuk berproduksi tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis.
- Lumbung energi nasional
- Industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi
- Pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan melalui jalur darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, serta jalur laut dengan Filipina
- Kawasan Ekonomi Khusus Maloy, Kawasan Industri Landak, Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong.
- Pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya).
- Pengembangan Jalur Kereta Api Kalimantan

# RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI 2045

39



- Lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi
- Industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam yang berkelanjutan

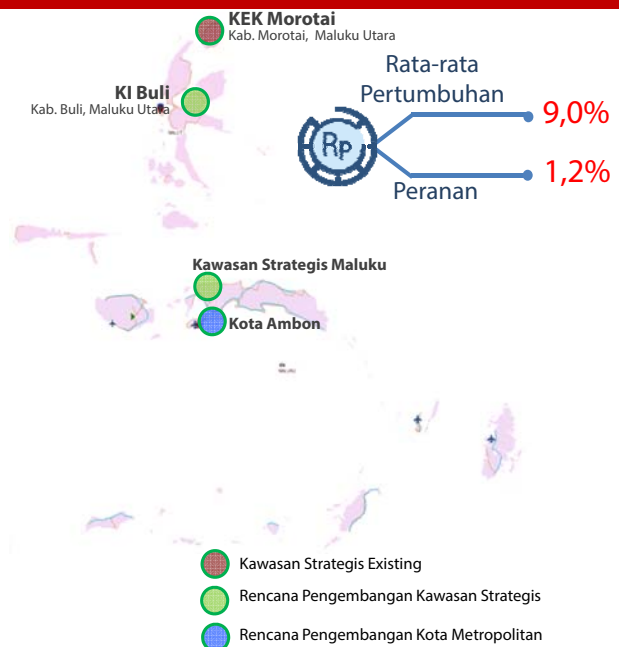


- Kawasan metropolitan Mamminasata dan rencana pengembangan kawasan metropolitan Bimindo
- Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa.
- Pengembangan kawasan Aerotropolis di Manado

# RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU 2045

40

- Pendayagunaan sumberdaya kelautan (minapolitan), daratan, & pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan.
  - Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Maluku
  - Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempah-rempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
- 
- Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai kawasan pariwisata
  - Kawasan Industri Buli serta rencana pengembangan kawasan strategis Ambon.
  - Pengembangan Kota Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon

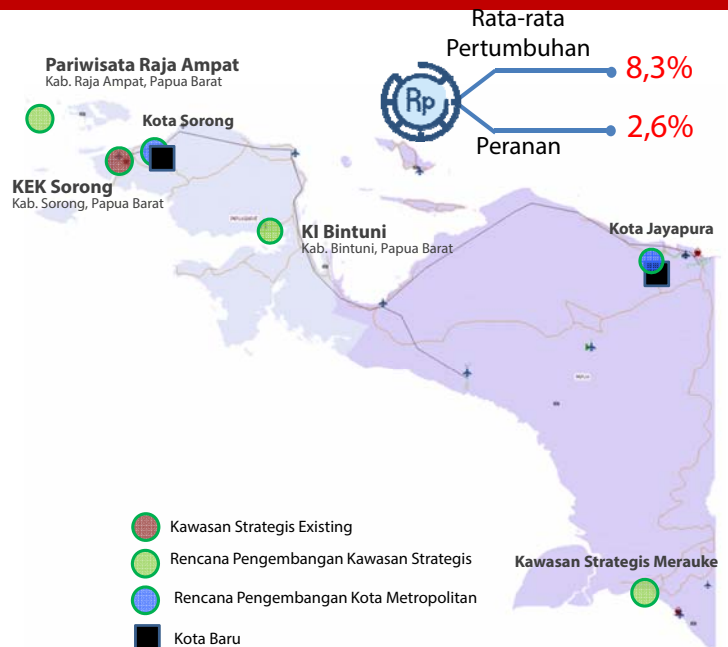




- Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, sektor perikanan, sektor perkebunan, dan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kemampuan daya dukung lingkungan setempat
- Pemanfaatan ruang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial maupun ekonomi bagi masyarakat adat dengan skema kepemilikan/kompensasi komunal
- Mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.



- Kawasan strategis di Merauke dan Kawasan Pariwisata Raja Ampat. Sedangkan
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri Teluk Bintuni.
- Pengembangan kota pelabuhan di Jayapura, Sorong, dan Merauke



**TERIMA KASIH.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D  
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 21 Januari 1965  
Golongan : IVC  
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT 03/RW01,  
Kedaung, Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992  
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310  
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195  
E-mail: sumedi@bappenas.go.id  
sumediam@gmail.com

### PENDIDIKAN

1. Postdoctoral. Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
2. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering, the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
3. S2. Master of Arts, Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar. 1999.
4. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994-Mar. 1995.
5. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni 1984-Juli 1989.

### PEKERJAAN

1. Direktur Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. September 2016-sekarang
2. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah. Januari 2006-September 2016
3. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Mei 2004-Jan. 2006
4. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat. Des. 2000-Mei 2004
5. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Mei 1999 -Des. 2000
6. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan. Maret 1994 -Jan. 1997
7. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik, 1991-Maret1994